

**PERAN NILAI-NILAI MAQHASID SYARIAH
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI TENGAH PANDEMI COVID 19**

Siti Khayisatuzahro Nur¹, Dimas Herliandis Shodiqin²

Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

e-mail: Sitikhayisatuzahro.nur@unmuhjember.ac.id,
dherliandis@unmuhjember.ac.id

Abstract

The problem of poverty in Indonesia is certainly crucial and results in the country's economic slowdown. Various poverty alleviation programs were initiated by the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K). The poverty alleviation model has been implemented and has had a positive impact on reducing poverty in Indonesia. In line with the program, Islam is present as a means of achieving community welfare within the scope of sharia by using the values of Maqashid Sharia. The research method used in this research is descriptive research with a library research approach. The results of this study are: (1) the poverty reduction program is divided into 4 models of poverty alleviation stages, namely the social assistance development model, community empowerment development model, and micro-enterprise empowerment model (2) poverty reduction program by applying Maqashid Syariah values in accordance with the Maqashid Syariah principles described in 5 basic concepts, namely guarding religion, guarding reason, protecting soul, protecting offspring, and safeguarding property. Internalization of Maqashid Syariah values in poverty alleviation can be achieved to realize the benefit for the community.

Keywords: : Implementation, Maqashid Syariah Values, Poverty Alleviation

Abstrak

Masalah kemiskinan di Negara Indonesia tentu menjadi krusial serta berakibat pada perlambatan ekonomi Negara tersebut. Berbagai Program-program pengentasan kemiskinan diinisiasi oleh tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Model penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan dan memiliki dampak positif dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Sejalan dengan program tersebut, maka islam hadir sebagai sarana pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam lingkup syariah dengan menggunakan nilai-nilai Maqashid Syariah. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Adapun hasil penelitian ini adalah :(1) program penanggulangan kemiskinan terbagi dalam 4 model tahapan pengentasan kemiskinan yaitu model pengembangan bantuan sosial, model pengembangan pemberdayaan masyarakat, dan model pemberdayaan usaha

mikro (2) progam penanggulangan kemiskinan dengan penerapan nilai-nilai Maqashid Syariah sesuai dengan prinsip maqashid Syariah digambarkan dalam 5 konsep dasar yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Internalisasi nilai-nilai Maqashid Syariah dalam penanggulangan kemiskinan dapat dicapai untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kata kunci: Penerapan, Nilai-Nilai Maqashid Syariah, Penanggulangan Kemiskinan

Accepted: June 15 2022	Reviewed: June 25 2022	Published: July 30 2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

A. Pendahuluan

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sejak pandemi Covid 19 dirasakan sebagian masyarakat global. Tentu hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan manusia. Beberapa dampak vital yang dirasakan oleh masyarakat tidak hanya pada kesehatan saja, namun dalam bidang pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi membuat berbagai kebijakan pembatasan wilayah (*lockdown*) hampir di sejumlah wilayah di Indonesia atau dikenal dengan PPKM (Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat).

Dengan berbagai model kebijakan ini, tentu sangat berdampak pada aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Berbagai masalah ekonomi timbul dan berdampak serius bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pembatasan PPKM, masyarakat tidak leluasa melakukan aktivitas maupun pekerjaan bahkan hingga kehilangan pekerjaan. Tentu hal ini berdampak pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan khususnya yang terjadi di wilayah Indonesia.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan bersifat multidimensi meliputi aspek ekonomi, sosial, kebijakan, pendidikan. Kemiskinan menjadi masalah dasar yang harus segera ditangani oleh pemerintah pusat maupun daerah. Data yang dilansir oleh *Institute for Development of Economic* (Indef) menunjukkan bahwa adanya peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan pada penduduk Indonesia pada tahun 2021. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan naik hampir 7,8 persen atau sebanyak 10,4 juta jiwa pada tahun 2021. Sedangkan pada sisi kemiskinan, Indef memperkirakan tingkat kemiskinan sebesar 10,5 persen (Rizal & Mukaromah, 2020).

Pemerintah Indonesia saat ini menitikberatkan strategi pembangunan pada penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan penyediaan

kesempatan kerja bagi masyarakat usia produktif. Dengan bentuk strategi pembangunan ini, dapat dikatakan mampu memberikan dampak positif dimana dapat menurunkan angka kemiskinan yang ada. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan Pemerintah masih dinilai belum efektif. Hal ini ditandai dengan ketimpangan kemiskinan yang ada di beberapa Provinsi di Indonesia. Selain itu, dalam bentuk pelaksanaan program penganggulangan kemiskinan tidak didapatkan secara adil dan merata di kalangan masyarakat. Ditambah lagi posisi penduduk miskin amat rentan terhadap masalah ekonomi, sosial dan lainnya, seperti halnya, masalah inflasi, kemarau panjang, kelangkaan bahan pokok, wabah penyakit, virus, dan masalah sosial ekonomi lainnya (Royat, 2015).

Hadirnya islam sebagai salah satu agama *rahmatan lil alamin* dapat dijadikan sebagai pandangan hidup (*way of life*) bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim. Cakupan ajaran agama islam tidaknya mengatur dalam sisi peribadatannya saja, namun mampu menjadi aturan hidup dalam berbagai kehidupan manusia. Dalam kajian ekonomi, islam telah telah memberikan sumbangsih terbesar bagi aktifitas perekonomian dunia yang berimplikasi pada kesejahteraan umat (kemaslahatan).

Kemaslahatan merupakan titik pokok aktifitas manusia baik dari sisi ekonomi, sosial, pendidikan yang mewujudkan kebutuhan umat secara menyeluruh. Kemaslahatan tentu dapat dicapai jika kebijakan-kebijakan pemimpin suatu negara atau daerah mampu menghadirkan aturan yang bersifat adil dan mampu memprioritaskan kebutuhan masyarakat secara kompleks. Kemaslahatan dalam islam diwujudkan pada 5 konsep dasar pemenuhan kebutuhan manusia berdasarkan nilai-nilai syariah islam. *Maqhasid Syariah* dapat dikatakan sebagai dasar prinsip kebutuhan manusia sebagai pencapaian tujuan tertinggi syariah yang diberlakukan Allah SWT. Dalam konteksnya, *Maqhasid Syariah* merumuskan kebutuhan dasar manusia diantaranya yaitu pelestarian agama, pelestarian kehidupan, pelestarian keturunan, pelestarian akal, dan pelestarian kekayaan (Subari, 2020).

Pada masalah kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, maka kiranya perlu pemerintah mendekatkan nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam *Maqhasid Syariah* sebagai *role model* baru penanggulangan kemiskinan secara efektif dan sesuai dengan syariah. Keberadaan *Maqhasid Syariah* tentu berperan penting bagi pemerintah agar mampu memberikan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan memanusiakan manusia. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan nilai-nilai *Maqhasid Syariah* dalam penanggulangan kemiskinan selama Pandemi

Covid 19 serta kesesuaian program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan sesuai dengan pendekatan *Maqhasid Syariah*. Diharapkan dalam penelitian ini, mampu memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat terkait konsepsi kemaslahatan dalam penanggulangan kemiskinan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data, literature, kajian yang bertujuan dengan objek penelitian. Sedangkan penelitian ini menggunakan dan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif tentang fenomena sosial yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu mengenai peran nilai-nilai *Maqhasid Syariah* sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan serta peran pemerintah melalui program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan nilai-nilai *Maqhasid Syariah*.

Dari data hasil telaah literatur, maka langkah selanjutnya peneliti menganalisa data hingga memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data. Teknik analisis isi (*content analisis*) digunakan untuk memberikan deksripsi jelas dan tepat terkait peran nilai-nilai *Maqashid Syariah* dalam menanggulangi kemiskinan Selain itu, model analisis isi tentu memudahkan pemahaman secara benar terkait kesesuaian nilai-nilai *Maqashid Syariah* dengan program penganggulangan kemiskinan selama pandemi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

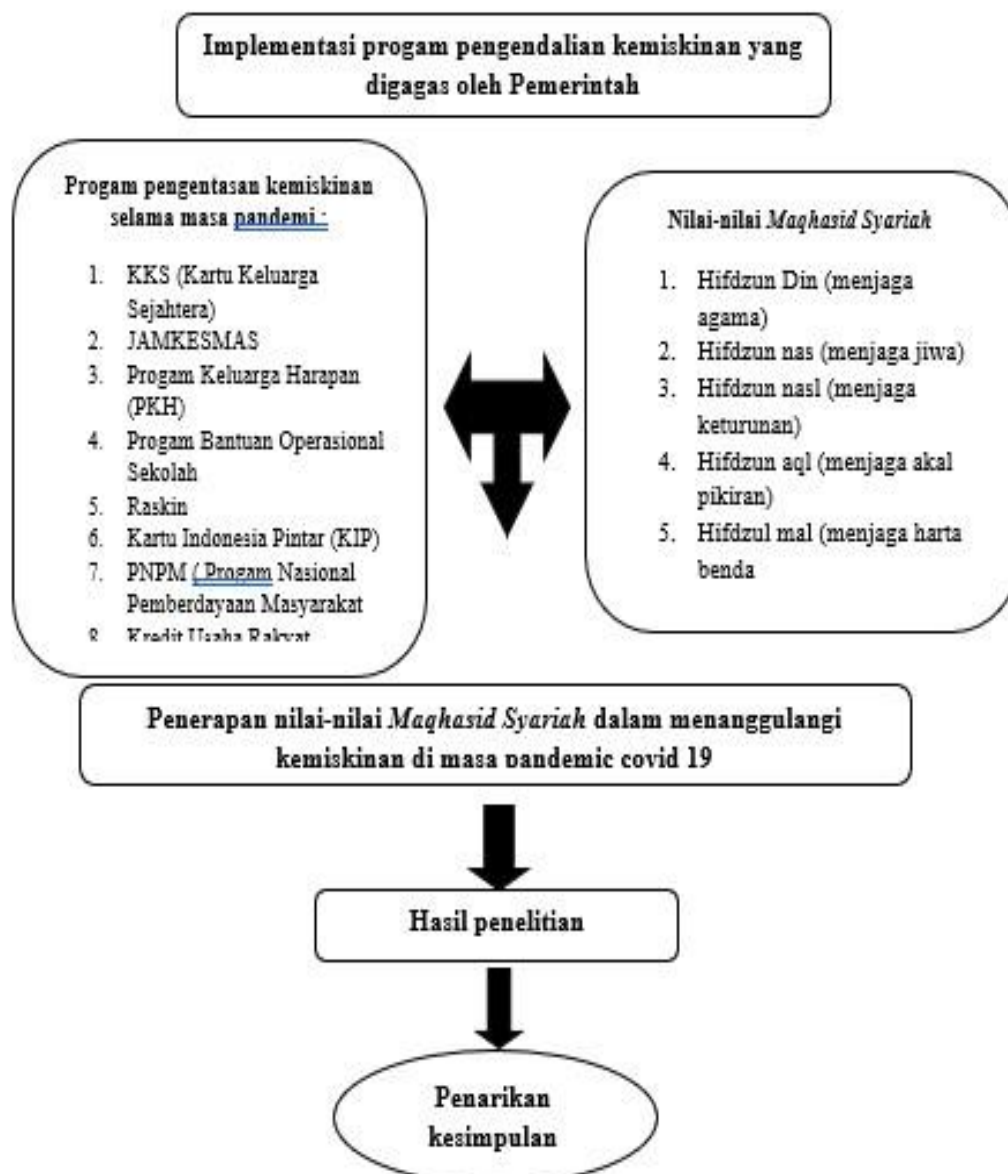
Adapun langkah-langkah stategis dalam penelitian analisis isi, sebagai berikut:

1. Peneliti menetapkan desain atau model penelitian
2. Peneliti melakukan pencairan data pokok atau data primer terkait program pengentasan kemiskinan
3. Peneliti melengkapi data pengetahuan kontekstual serta data literatur terkait nilai-nilai *Maqhasid Syariah* dan penerapannya dalam pengentasan kemiskinan serta mewujudkan kemaslahatan umat.
4. Mendisplay data untuk memudahkan peneliti dalam merumuskan pemecahan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini.
5. Menganalisis isi dengan memberikan deskripsi data program pengentasan kemiskinan lalu dianalisis dengan pendekatan nilai-nilai *Maqashid Syariah*. Pada analisis isi, juga memberikan pemahaman bagi peneliti dalam

menjelaskan peran nilai-nilai *Maqashid Syariah* bagi program penanggulangan kemiskinan.

6. Memberikan hasil analisis dalam bentuk pembahasan tersusun sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji.
7. Menarik kesimpulan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel kerangka penelitian pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka penelitian

C. Hasil dan Pembahasan

1. Progam Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan

Berbagai macam upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan telah dirumuskan dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penganggulangan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan diimplementasikan melalui Tim Nasional Percepatan Penganggulangan Kemiskinan (TNP2PK) yang secara langsung dikoordinasikan di bawah Wakil Presiden Republik Indonesia (tnp2k.go.id). TNP2K merupakan Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sector dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat sebagai Lembaga yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. Dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan rancangan program di berbagai kementerian dan Lembaga serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.

Terdapat empat strategi dasar yang ditetapkan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

- a. Menyempurnakan program perlindungan sosial.
- b. upaya dan strategi dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
- c. program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
- d. upaya meningkatkan pembangunan inklusif di tengah-tengah masyarakat.

Dalam mewujudkan dasar-dasar strategi tersebut, maka tim TNP2K merumuskan tiga model klaster kebijaksanaan. Kebijakan pertama, program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial sebagaimana pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Bentuk klaster bantuan yang diterima seperti, KIS (Kartu Indonesia sehat), Program PKH, BLT, Dana Desa, Subsidi Gaji, Subsidi Listrik. Kedua, program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mendorong masyarakat keluar dari zona kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Program yang ditawarkan dalam bentuk kartu pra kerja, KIP dan PNPM (Fadilah, 2013).

Ketiga, program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang merupakan aspek penting dalam penguatan modal dan usaha dalam bentuk model kerja yang dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka di beberapa lembaga keuangan pemerintah, bentuk implementasi program ini adalah kredit usaha rakyat (KUR), dan restrukturisasi pembiayaan.

Dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan, maka pemerintah melakukan berbagai upaya diantaranya:

- a. Pemerintah berupaya memberikan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha terutama bagi perusahaan yang berkomitmen tidak melakukan PHK bagi karyawannya selama masa pandemi berlangsung.
- b. Program keringanan yang dikhususkan pada pekerja sektor formal diantaranya, insentif pajak, relaksasi pembayaran BPJS, subsidi listrik, dan relaksasi pembayaran kredit atau pinjaman.
- c. Pemerintah juga berupaya memberikan jaring pengaman nasional bagi para pekerja sektor informal yang diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial bagi pekerja miskin dan rentan miskin
- d. Pemerintah memberikan program prioritas pekerja dan korban PHK
- e. Pelaksanaan secara massif bentuk program padat karya tunai melalui pelaksanaan program kementerian seperti kementerian desa PDTT, dan kementerian PUPR (Kementerian Pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Kemen PUPR) serta kementerian lainnya.
- f. Memberikan perlindungan bagi pekerja migran baik yang sudah berada di wilayah Indonesia maupun yang masih berada di luar negeri dalam bentuk paket sembako dan bantuan tunai.

Hingga saat ini, bentuk implementasi program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan. Meskipun demikian, pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan masih belum mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Sehingga masalah kemiskinan perlu diberikan perhatian khusus dari pemerintah mulai di tingkat pusat maupun daerah.

2. Nilai-Nilai *Maqashid Syariah* dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

Maqashid syariah terbentuk dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*, *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *Maqsad* yang artinya tujuan. Sedangkan *Syari'ah* dapat diartikan hukum Allah yang ditetapkan sebagai pedoman yang dapat digunakan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain *Maqashid Syari'ah* dapat diartikan sebagai pencapaian dari sebuah tujuan yang hendak dicapai dengan merujuk pada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Sobaya, 2020:165).

Konsepsi *Maqashid Syariah* menjadi tujuan para pemikir muslim lainnya yang memfokuskan pada kesejahteraan manusia dan pengentasan kemiskinan. Seperti halnya yang digagas oleh Al Juwayni. Beliau menjelaskan teori kebutuhan

berdasarkan 5 dasar kebutuhan manusia. Kemudian kajian Al Qardhawi menekankan pada kebutuhan untuk mempertahankan iman yang benar, menjaga martabat manusia. Lalu dilanjutkan dengan Umer Capra yang menekankan bahwa tujuan akhir ajaran islam adalah mencapai masalah atau kebaikan bagi semua umat manusia yang hanya bisa dipenuhi dengan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (Effendi, 2005).

Tentu dalam hal ini rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini menunjukkan salah satu model kebaruan pengembangan ilmu pengetahuan. Dimana model progam penanggulangan kemiskinan yang digagas oleh pemerinitah di tengah pandemi menjadi sorotan. Tentu penerapan nilai-nilai *Maqashid Syariah* sangat diperlukan untuk mencetuskan model pemberdayaan masyarakat yang tepat dan sesuai dengan masalah yang berkembang di masyarakat. Selain itu, perlunya kesesuaian nilai-nilai *Maqashid Syariah* dalam pelaksanaan progam penganggulungan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, agar progam tersebut dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Jika konsepsi *Maqhasid Syariah* dikaitkan dengan progam pengentasan kemiskinan diwujudkan pada model pengembangan dan pemenuhan kelima pokok *Maqashid Syariah* dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat (Subari, 2020). Konsepsi pengentasan kemiskinan dalam pendekatan nilai-nilai *Maqashid Syariah* dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini

**Tabel 1. Pengentasan Kemiskinan dalam Pendekatan
Nilai-Nilai *Maqhasid Syariah***

No	Maqashid syari'ah	Bentuk progam pengentasan kemiskinan	Indikator capaian
1.	Menjaga jiwa (hifdzun nafs)	Bantuan langsung tunai Bantuan keluarga miskin Kartu pra kerja	terpenuhi kebutuhan primer, rasa aman, dan kebebasan dan kesempatan bekerja
2.	Pemeliharaan agama (hifdzun din)	Progam pendukung dalam menegakkan agama islam secara berkesinambungan serta wujud filantropi yang digagas oleh organisasi keislaman	Terjaganya iman dan aqidah Kesempatan dan keamanan dalam beribadah Mendapatkan bantuan sosial keagamaan
3.	Pemeliharaan akal	Pelaksanaan progam pendidikan Bantuan dana pendidikan Bantuan tunai pendidikan	Terciotanya massyarakat yang berkultas dan mampu mengembangkan

		Sarana pendidikan Pelatihan dan penyediaan kesempatan kerja	kaulifikasi diri dalam rangka meningkatkan kompetensi.
4.	Pemeliharaan keturunan	Progam bagi pendidikan anak Progam fasilitas kesehatan yang terjangkau Pemenuhan kebutuhan pokok secara terjangkau	Keluarga yang handal dan mampu mengelola keuangan dan mempersiapkan dana pendidikan bagi masa depan anak-anaknya
5.	Pemeliharaan harta	Penanaman modal Bentuk pinjaman lunak Kredit rakyat Bantuan sosial	Masyarakat mampu mengakses dana-dana serapan modal untuk kegiatan berwirausaha maupun bentuk penanaman investasi

Sebagai agama yang menjunjung prinsip ta'awun dalam pengamalannya, seyogyanya islam mampu memberikan kontribusi secara menyeluruh dalam mengatasi kemiskinan dengan berbagai model kegiatan filantropi yang telah digagas dalam bentuk instrument ZISWAF.

Sebagai salah satu ibadah filantropi bagi umat islam, maka keberadaan instrument ZISWAF (zakat, infak, wakaf dan shadaqah) dipergunakan dalam menanggulangi kemiskinan menjadi gagasan utama pemerintah saat ini. Berbagai Lembaga amal zakat mengoptimalkan pengelolaan zakat dilakukan oleh amal zakat yang amanah, terpercaya dan professional. Peran penting amal zakat mampu mendistribusikan zakat dalam bentuk progam-progam tidak hanya bersifat konsumtif, namun juga progam produktif (investasi dan bantuan modal) bagi mustahiq. Dengan begitu, progam penanggulangan kemiskinan yang terpusat pada distribusi mustahiq yang mayoritas warga miskin dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, hal ini juga dapat memunculkan efek multiplier zakat di lingkungan masyarakat hingga lingkup Negara.

Progam penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan belum mampu diserap dengan berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan progam tersebut. Untuk itulah perlu solusi bagi pemerintah dalam merumuskan progam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan konsepsi masalah dalam pendekatan islam di dalamnya. Adapun rekomendasi yang digagas yaitu:

1. Perlunya pendekatan sosial kepada masyarakat khususnya bagi golongan warga miskin baik di tingkat desa hingga tingkat pusat.

2. Perlunya kebijakan yang terukur dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah
3. Optimalisasi peran pemerintah desa dalam melakukan monitoring jumlah warga miskin secara berkelanjutan. selain itu mengevaluasi jumlah keluarga miskin setiap periode dalam menentukan jumlah penerima BLT di tingkat desa.
4. Perlunya keterlibatan aktif bagi Lembaga islam-islam dalam mensukseskan program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.
5. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban ibadah maliah (ZISWAF) mulai dari keluarga hingga lingkungan sosial.

D. Kesimpulan

Masalah kemiskinan di Indonesia menjadi masalah krusial yang menjadi tanggung jawab pemerintah setiap tahunnya. Program penanggulangan kemiskinan yang digagas oleh pemerintah dalam berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dari berbagai program ini, secara tidak langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara agregat. Namun dalam pelaksanaannya, golongan masyarakat miskin belum memperoleh manfaat nyata dari proses pembangunan dan pemberdayaan pemerintah selama ini.

Bersamaan dengan itu, gagasan penanggulangan kemiskinan diselaraskan dengan konsepsi masalah sesuai dengan pendekatan islam. Islam memandang permasalahan kemiskinan menjadi masalah bersama tidak hanya pemerintah semata. Peran aktif masyarakat dalam memberikan kontribusi dalam berbagai kegiatan filantropi dan instrumen sosial bagi masyarakat. Lebih dari itu, konsepsi masalah yang digagas dalam maqhasid Syariah terimpelentansi pada berbagai program penanggulangan kemiskinan, seperti halnya: *Hifdzun Nas* (menjaga jiwa) termuat pada program BLT (bantuan langsung tunai), *Hifdzud Din* (implemetasi instrument filantropi islam), dan *Hifdzul Mal* (program perberdayaan ekonomi dan bantuan modal). Berbagai program ini dilaksanakan pemerintah secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Masalah kemiskinan di Indonesia menjadi masalah krusial yang menjadi tanggung jawab pemerintah setiap tahunnya. Program penanggulangan kemiskinan yang digagas oleh pemerintah dalam berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dari berbagai program ini, secara tidak langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara agregat. Namun dalam pelaksanaannya, golongan masyarakat miskin belum memperoleh manfaat nyata dari proses pembangunan dan pemberdayaan pemerintah selama ini.

Bersamaan dengan itu, gagasan penanggulangan kemiskinan diselaraskan dengan konsepsi masalah sesuai dengan pendekatan islam. Islam memandang permasalahan kemiskinan menjadi masalah bersama tidak hanya pemerintah semata. Peran aktif masyarakat dalam memberikan kontribusi dalam berbagai kegiatan filantropi dan instrumen sosial bagi masyarakat. Lebih dari itu, konsepsi masalah yang digagas dalam maqhasid Syariah terimpelentansi pada berbagai program penanggulangan kemiskinan, seperti halnya: *Hifdzun Nas* (menjaga jiwa) termuat pada program BLT (bantuan langsung tunai), *Hifdzud Din* (implemetasi instrument filantropi islam), dan *Hifdzul Mal* (program perberdayaan ekonomi dan bantuan modal). Berbagai program ini dilaksanakan pemerintah secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Daftar Rujukan

- Effendi, J. (2005). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kabupaten Indramayu)*. 1–194.
- Fadilah, I. F. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, 12(1), 1–12.
- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2020). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 35–66.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631>
- Royat, S. (2015). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Kajian Bidang Kesejahteraan Masyarakat*, 1, 41–51.
- Subari, M. (2020). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Studi Islam: Pancawahana*, 15(1), 33.